

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan serangkaian 17 tujuan dunia yang disepakati pada tahun 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan dunia tahun 2016-2030 (Ramadhani & Prihantoro, 2020). Tujuan-tujuan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan di planet Bumi. Hal ini termasuk pengentasan kemiskinan, memastikan kesehatan yang baik dan pendidikan berkualitas untuk semua, mendorong kesetaraan gender, mendorong pengelolaan air yang berkelanjutan, air minum dan sanitasi, serta akses terhadap energi bersih, dan harga yang terjangkau. SDGs juga menyoroti pentingnya pekerjaan yang layak, membangun infrastruktur yang kuat dan mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Melalui tujuan-tujuan ini, SDGs bertujuan untuk menciptakan perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, melestarikan kehidupan di air dan di darat, serta mendorong perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Tujuan terakhir SDGs adalah memperkuat upaya kolaboratif global untuk mencapai semua tujuan tersebut, dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi komunitas internasional dalam upaya mereka mencapai pertumbuhan pesat dalam aktivitas pembangunan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan.

Salah satu sektor yang sangat berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan adalah pariwisata. Secara langsung maupun tidak, pariwisata memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata dapat membantu mencapai berbagai sasaran, seperti mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mendorong pengembangan industri pendukung dan inovasi, serta mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab. (Chaerunissa & Yuniningsih, 2020). Beberapa contoh tujuan SDGs yang terkait dengan pariwisata yaitu SDGs ke-1 tentang pengurangan kemiskinan, SDGs ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak yang berkelanjutan, SDGs ke-12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan SDGs ke-14 tentang menjaga ekosistem dan memanfaatkan SDA laut secara berkelanjutan.

Salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara adalah sektor pariwisata. Pariwisata berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempromosikan keragaman budaya di suatu daerah. Di negara seperti Indonesia sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan pendapatan negara. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, terletak di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di sebelah Barat dan Selatan serta Samudra Pasifik di sebelah Timur Laut. Hal ini berdampak ke SDA sangat banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. SDA yang beranekaragam juga dapat menjadi keunggulan untuk dijadikan tempat - tempat wisata yang indah. Potensi wisata Bahari juga beragam karena Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau.

Potensi SDA Indonesia yang besar memberi manfaat untuk pengembangan pariwisata serta pemasukan pendapatan negara.

Pariwisata seringkali memanfaatkan keunggulan SDA sebagai daya tarik untuk menarik minat wisatawan. Sumber daya alam seperti pesisir, gunung, danau, hutan, taman nasional dan keindahan alam lainnya menjadi ketertarikan wisatawan dari seluruh penjuru untuk dibangun objek wisata yang populer dan menarik.

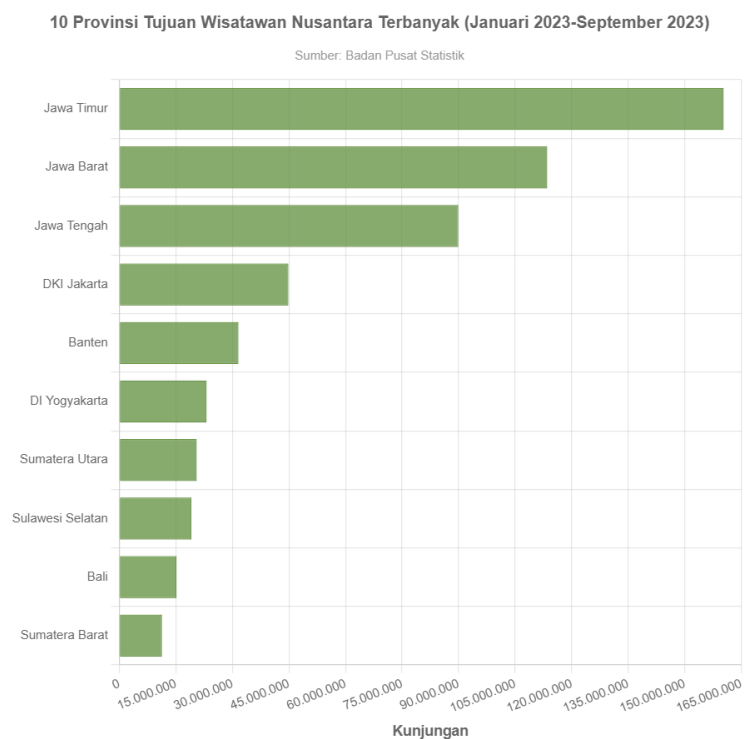
Perkembangan pariwisata, terjadi perubahan paradigma dari dampak yang dihasilkan pengembangan pariwisata. Pariwisata yang berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi yang maksimal dan menarik sebanyak mungkin wisatawan sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan di lokasi wisata, baik di aspek alam maupun sosial budaya. (Revida & Frida, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya konsep yang dapat meminimalisir dampak negatif dari pengembangan pariwisata yaitu dengan konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) (Widiati & Permatasari, 2022). Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip yang dapat diterapkan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*).

Penelitian tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan sudah banyak dilakukan. Misalnya penelitian dari Kanom dan Darmawan (2021) tentang “Strategi Pengembangan Pantai Pulau Merah Banyuwangi Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam pengembangan Pantai Pulau Merah sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan ditemukan bahwa terdapat 2 potensi antara lain potensi alam dan sosial. Sedangkan faktor penghambat

yang ditemukan antara lain masih lemahnya manajemen destinasi dan kurangnya kolaborasi. Adapun menurut Pratiwi (2023), komponen 4A (*Attraction, Amenity, Accessibility dan Ancillary*) dalam pariwisata dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam Kabupaten Belitung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) adalah peraturan hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur kegiatan kepariwisataan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, definisi pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, Kemenparekraf mengeluarkan Permenparekraf Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pariwisata yang berkelanjutan dan meminimalisir dampak negatifnya bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Selain itu dapat mempromosikan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan lingkungan dalam pengembangan destinasi wisata. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) saat tahun 2014 mengakui bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dan merupakan suatu elemen kunci dalam upaya melakukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryanata et al., 2023).

Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki luas wilayah mencapai 5.176.800 km² yang terdiri dari daratan dan lautan. (Saksono, 2013, Yuli Firdaus et al., 2023). Hal ini menyebabkan tiap wilayah di Indonesia memiliki keunikan dan potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Keanekaragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan keindahan alam yang dimiliki berbagai Provinsi di Indonesia sangat menarik wisatawan dari berbagai daerah. Jumlah wisatawan nusantara yang mengunjungi Provinsi di Indonesia untuk berwisata sebagai berikut.



Gambar 1.1 Provinsi Tujuan Wisatawan Nusantara Terbanyak

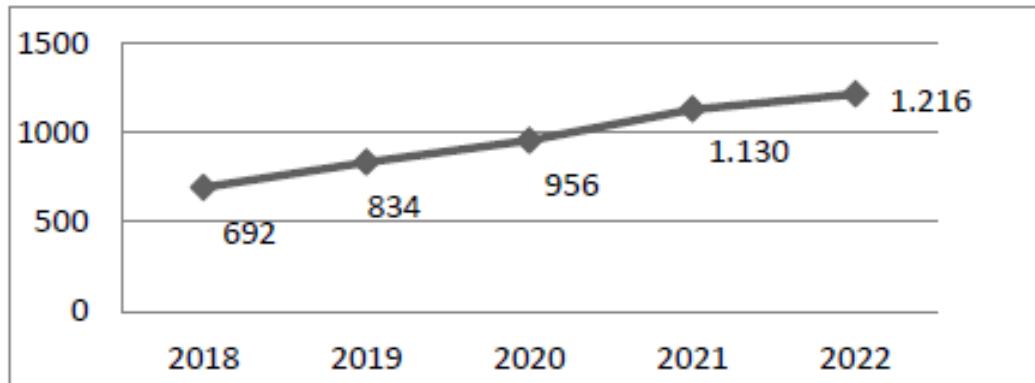
Sumber: data.goodststs.id Tahun 2024

Berdasarkan informasi yang telah dibuat oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Januari tahun 2024, terdapat 10 provinsi tujuan wisatawan nusantara

terbanyak selama periode Januari 2023 hingga September 2023. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kunjungan terbanyak, mencapai sekitar 160 juta kunjungan. Jawa Barat menempati posisi kedua dengan lebih dari 120 juta kunjungan, sementara Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan hampir 100 juta kunjungan. Data ini menunjukkan bahwa pulau Jawa masih menjadi tujuan utama wisatawan domestik, dengan tiga provinsi di pulau ini menempati posisi teratas. Keberagaman budaya, destinasi wisata alam, serta kemudahan akses dan infrastruktur yang baik kemungkinan menjadi faktor utama tingginya jumlah kunjungan di provinsi-provinsi tersebut.

Provinsi yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan nusantara terbanyak pada tahun 2023 salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan pariwisata yang tak kalah menarik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Letaknya yang strategis berada di tengah-tengah antara provinsi di Pulau Jawa menyebabkan Jawa Tengah mudah dijangkau oleh wisatawan yang akan berkunjung. Provinsi Jawa Tengah kaya akan berbagai daya tarik wisata, termasuk potensi alam, budaya, dan buatan. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan destinasi wisata yang sangat menarik bagi para pengunjung baik wisnus (wisatawan nusantara) maupun wisman (wisatawan mancanegara). Pertumbuhan pariwisata di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun, seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

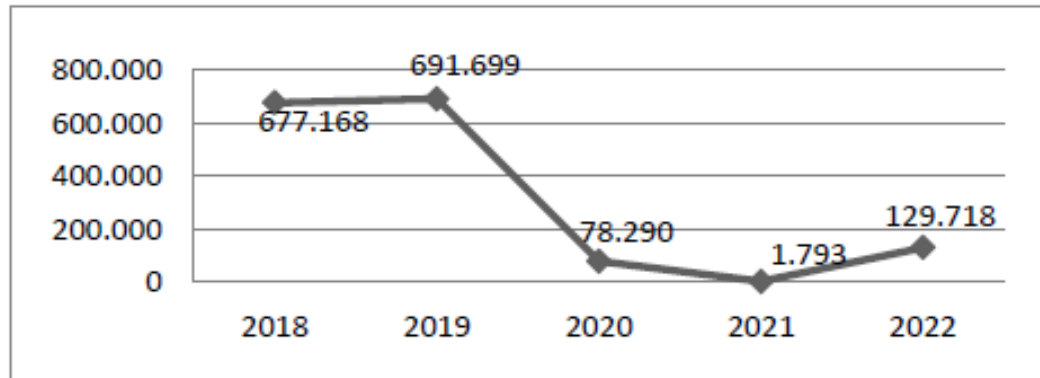
Tabel 1.1 Grafik Daya Tarik Wisata, Minat Khusus, Lain Lain (Usaha) Di Jawa Tengah



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2022

Jumlah usaha, potensi wisata, dan peminatan lainnya di Jawa Tengah telah meningkat, seperti yang ditunjukkan dalam grafik Tabel 1.1 secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 692, kemudian meningkat menjadi 834 pada tahun 2019, 956 pada tahun 2020, 1.130 pada tahun 2021, dan mencapai 1.216 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun, meskipun laju peningkatan dari tahun ke tahun bervariasi. Misalnya, peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 lebih besar dibandingkan dengan kenaikan dari 2021 ke 2022.

Tabel 1.2 Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang) Di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

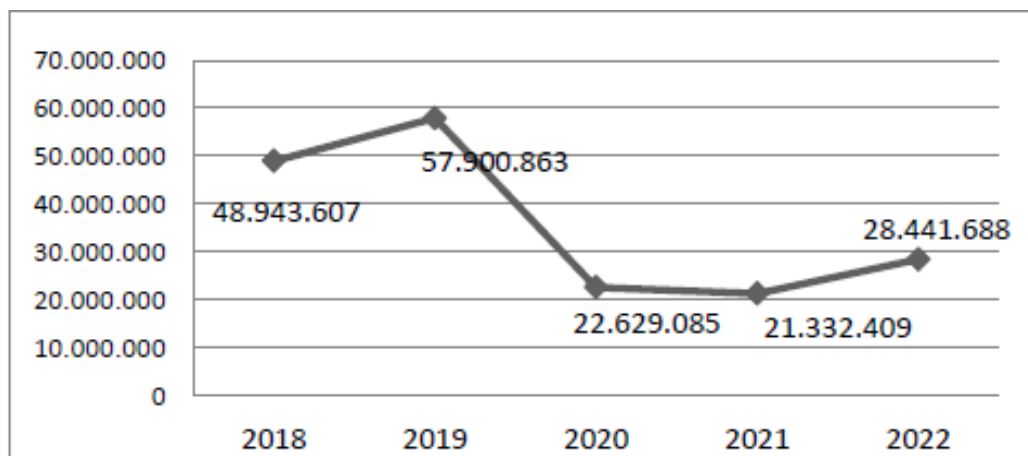


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2022

Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 677.168 orang, yang kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 691.699 orang pada tahun 2019. Ini menunjukkan stabilitas dalam jumlah wisatawan mancanegara sebelum tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis dalam jumlah wisatawan mancanegara disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi perjalanan internasional secara global. Hal ini menyebabkan pada tahun 2021, jumlah wisatawan mancanegara mencapai titik terendah hanya dengan 1.793 orang, yang terjadi di semua daerah termasuk kunjungan ke Pulau Bintan yang merupakan tujuan wisata mancanegara ketiga terbesar di Indonesia setelah Bali dan Yogya (Kismartini et al.).

Setelah pandemi Covid-19 berlalu, pada tahun 2022 terdapat pemulihan dalam jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 129.718 orang, termasuk di Jawa Tengah .

Tabel 1.3 Grafik Jumlah Wisata Nusantara (orang) di Jawa Tengah tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2022

Grafik menunjukkan tren jumlah wisatawan nusantara di Jawa Tengah dari 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan nusantara tercatat sebanyak 48,9 juta orang dan meningkat tajam pada tahun 2019 menjadi 57,9 juta orang, mencerminkan pertumbuhan positif sektor pariwisata domestik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga 22,6 juta wisatawan akibat pandemi Covid-19, yang terus berlanjut pada 2021 dengan jumlah wisatawan mencapai 21,3 juta orang. Pada tahun 2022, terjadi pemulihan signifikan dengan peningkatan jumlah wisatawan nusantara menjadi 28,4 juta orang, meskipun belum mencapai angka sebelum pandemi. Grafik ini secara keseluruhan menunjukkan dampak besar pandemi terhadap sektor pariwisata domestik, namun diiringi pemulihan yang mulai terlihat pada tahun 2022.

Berdasarkan ketiga grafik tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan perkembangan pariwisata di Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Perkembangan pariwisata juga diikuti meningkatnya wisatawan yang berkunjung. Jumlah terbanyak kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah ada pada tahun 2019, yaitu sebanyak 691.699 wisatawan mancanegara dan sebanyak 57.900.863 wisatawan nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa potensi daya tarik wisata di Jawa Tengah yang beragam sangat layak dikunjungi dan dapat menarik wisatawan baik dari nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2020 sektor pariwisata di Jawa Tengah mengalami penurunan akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Meski demikian pada tahun berikutnya mulai terjadi kenaikan jumlah wisatawan yang mengunjungi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memiliki banyak potensi pariwisata yang menarik bagi pengunjung. Hampir seluruh dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai atraksi wisata yang beragam. Meskipun demikian, hanya beberapa di antaranya yang menerima kunjungan wisatawan dengan jumlah signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Kota Semarang menjadi tujuan wisata paling populer di Jateng dengan jumlah kunjungan mencapai 2,6 juta orang dalam setahun. Tempat-tempat wisata terkenal di Kota Semarang meliputi Lawang Sewu, Kawasan Kota Lama, Wana Wisata Penggaron, dan berbagai Pantai di Semarang. Selain Semarang, Klaten juga merupakan destinasi wisata yang diminati di Jawa Tengah, dengan jumlah kunjungan mencapai sekitar 1,6 juta wisatawan pada tahun 2021, terutama untuk mengunjungi Candi dan Sumber Mata Air. Daerah lain di Provinsi Jawa Tengah yang sering dikunjungi oleh wisatawan termasuk Banyumas dengan kunjungan sekitar 1,5 juta wisatawan setiap tahun, Kabupaten Tegal dengan kunjungan sebanyak 496.532 orang pada tahun 2021, dan

Kota Solo dengan jumlah kunjungan 378.000 wisatawan pada tahun yang sama (Ayu, 2023). Akan tetapi, Kabupaten Brebes hanya menarik 80.938 pengunjung pada tahun 2022. Hal ini sangat disayangkan karena Kabupaten Brebes juga memiliki keanekaragaman potensi wisata yang tidak kalah menarik dari daerah-daerah lain di Jawa Tengah.

Kabupaten Brebes memiliki keanekaragaman potensi wisata dan budaya yang tersebar di seluruh daerahnya. Kabupaten Brebes memiliki banyak lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di sisi selatan, terdapat Agrowisata Pabrik Teh Kaligua, Waduk Penjalin, Telaga Renjeng, serta dua tempat pemandian air panas. Sementara itu, di bagian barat, terdapat Waduk Malahayu yang menawan. Di utara, dapat menikmati keindahan Pantai dan Hutan Mangrove Pandansari. (Ikhwan R A, 2020). Keberagaman tempat wisata di Kabupaten Brebes menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Berikut tabel jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Brebes tahun 2020-2021.

Tabel 1.4 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Di Kabupaten Brebes Tahun 2020-2021

Objek Wisata	Jumlah Pengunjung (Orang)	
	2020	2021
Pantai Randusanga Indah	65448	65448
Waduk Malahayu Banjarharjo	14644	53658
Pemandian Air Panas Tirta Husada	6915	10100
Pemandian Air Panas Cipanas Buaran	8010	6890
Agrowisata Kaligua Paguyangan	65121	80548

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2022

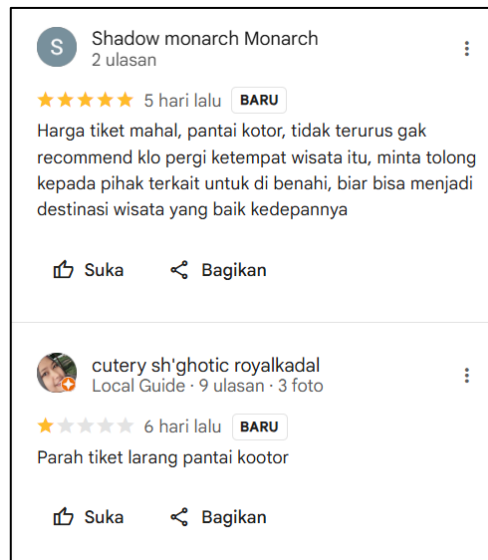
Berdasarkan Tabel 1.4 jumlah pengunjung pada tahun 2020 dan 2021, di beberapa objek wisata mengalami penurunan jumlah pengunjung. Salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung objek wisata pada tahun 2021 sebagaimana sudah disampaikan di atas adalah adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia. Secara umum beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata menurut Hartini (2023) adalah penurunan jumlah pengunjung, pengunjung hanya didominasi wisatawan domestik, lokasi wisata yang jauh dari jalan utama, serta aksesibilitas jalan yang kurang memadai. Sedangkan Safitri (2020) menjelaskan pengunjung wisatawan dapat mengalami penurunan diakibatkan oleh faktor fasilitas yang tidak memadai, tidak dikelola dengan baik, dan tidak ada promosi wisata.

Wilayah Kabupaten Brebes yang berada di pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) menyebabkan Brebes memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang. Panjang garis pantai wilayah Kabupaten Brebes adalah sekitar 63,63 km (Anjani et al., 2024). Kondisi wilayah demikian menyebabkan Kabupaten Brebes memiliki potensi wisata bahari yang bisa dimanfaatkan untuk destinasi wisata.

Kegiatan rekreasi alami yang dilakukan di tempat pesisir pantai atau laut, maupun bawah laut dinamakan wisata bahari. Wisata ini mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan laut dan pantai, seperti snorkeling, diving, perjalanan kapal, surfing, berlayar, dan menikmati pantai. Wisata Bahari menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah pesisir karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan perekonomian masyarakat lokal.

Salah satu objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Brebes adalah Pantai Randusanga Indah. Pada awalnya, pantai dengan panjang sekitar 2 km ini diabaikan oleh pemerintah. Namun, ketika jumlah pengunjung mulai meningkat dan tempat tersebut menjadi tempat berkumpul yang diminati, Pemerintah daerah mulai menyadari potensi besar yang dimiliki pantai Randusanga Indah sebagai destinasi wisata. Sejak tahun 2001, pantai ini secara progresif dikembangkan menjadi tujuan pariwisata yang menarik. Namun, pengelolaan objek wisata saat ini belum ideal. Jumlah fasilitas yang ada masih sangat sedikit. Misalnya, karena tidak ada tempat sampah yang cukup, pengunjung cenderung membuang sampah sembarangan, yang mengurangi keindahan tempat wisata. Selain itu, masalah yang perlu diperhatikan termasuk kondisi toilet umum yang buruk, kurangnya manajemen tempat parkir, dan kekurangan lampu. (NPD Wahana et al., 2023).

Beberapa permasalahan pengelolaan pada Pantai Randusanga Indah, diperkuat dengan adanya ulasan dari beberapa pengunjung yang mengunjungi Pantai Randusanga Indah untuk berekreasi. Berikut ini merupakan ulasan dari beberapa pengunjung Pantai Randusanga Indah.



Gambar 1.2 Ulasan Pengunjung Pantai Randusanga Indah

Sumber: Ulasan Review google

Pada Gambar 1.2 terdapat ulasan pengunjung yang mengeluhkan terkait kondisi pantai dan harga tiket masuk. Salah satu pengunjung memberikan ulasan dengan nilai 5 bintang, namun tetap merasa kecewa karena harga tiket yang dianggap cukup mahal serta kondisi pantai yang kotor dan kurang terawat. Meskipun tidak merekomendasikan Pantai Randusanga Indah kepada wisatawan lain, diharapkan pengelola dapat melakukan perbaikan agar pantai menjadi lebih baik di masa depan. Sementara itu, pengunjung lain memberikan penilaian yang lebih rendah, hanya 1 dari 5 bintang, dengan keluhan utama terkait harga tiket yang terlalu mahal dan kondisi pantai yang tidak bersih. Hal ini menunjukkan

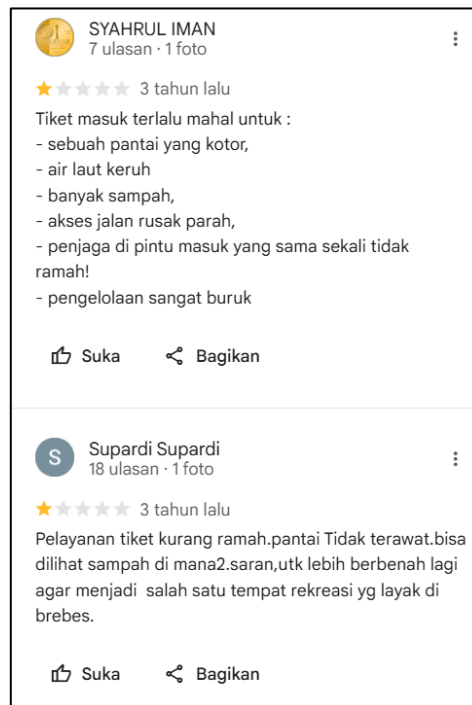
ketidakpuasan yang cukup besar terhadap pengalaman berwisata di Pantai Randusanga Indah. Selain itu terdapat ulasan dari pengunjung lainnya yang membandingkan dengan objek wisata di daerah lain.



Gambar 1.3 Ulasan Penunjang Pantai Randusanga Indah

Sumber: Ulasan Review Google

Pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pengunjung tersebut memberikan 1 dari 5 bintang dan membandingkan Pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes dengan objek wisata pantai di Kota Tegal, yang lebih baik dari segi harga dan fasilitas. Beberapa keluhan utama yang disampaikan mencakup harga tiket masuk yang dianggap mahal, kondisi pantai yang tidak terurus, serta kesan kumuh dan becek. Selain itu, minimnya fasilitas terutama tempat untuk membersihkan diri setelah bermain air di pantai. Adapun keluhan lainnya sebagai berikut.



Gambar 1.4 Ulasan Penunjung Pantai Randusanga Indah

Sumber: Ulasan Review Google

Salah satu pengunjung memberikan penilaian 1 dari 5 bintang dengan berbagai keluhan, termasuk harga tiket yang dianggap terlalu mahal untuk pantai yang dinilai tidak layak. Kondisi pantai yang kotor, air laut yang keruh, banyaknya sampah, akses jalan yang rusak parah, serta sikap penjaga pintu masuk yang kurang ramah, sehingga dianggap pengelolaan Pantai Randusanga Indah sangat buruk. Pengunjung lain juga memberikan skor serupa, mengkritik pelayanan tiket yang kurang ramah serta kondisi pantai yang tidak terawat dengan sampah berserakan di berbagai tempat.

Muakhor (2008) dalam meneliti objek wisata Pantai Randusanga Indah sebagai wisata unggulan menerapkan strategi pengembangan produk wisata, pemasaran wisata, dan manajemen kelembagaan menjadi fokus untuk

meningkatkan pasokan dalam industri pariwisata. Agar wisatawan terus tertarik dan tidak merasa jenuh dengan produk wisata yang sudah ada, inovasi sangat diperlukan dalam pengembangannya. Upaya ini juga bertujuan untuk melibatkan investor swasta, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan objek wisata ini. Dalam pembangunan pariwisata pada Kabupaten Brebes berlandaskan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata harus menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini juga didukung dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.

Peningkatan kualitas dan jumlah daya tarik wisata bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pendapatan daerah. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi dan pengembangan usaha di sektor pariwisata. Selain itu, pengembangan pariwisata daerah perlu didukung dengan promosi yang efektif, pembangunan, serta peningkatan sarana dan prasarana wisata agar lebih menarik bagi pengunjung. Semua upaya ini berperan dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik wisata, sehingga sektor pariwisata di Kabupaten Brebes dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kabupaten Brebes saat ini hanya memiliki satu objek wisata pantai, yaitu Pantai Randusanga Indah. Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pantai tersebut. Hal ini dilakukan agar

pengembangan objek wisata yang telah diresmikan dari tahun 2001 tersebut tidak stagnan. Selain itu, penelitian di objek wisata Pantai Randusanga Indah masih menemukan permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan. Pengembangan pariwisata yang dikelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung. Pariwisata yang dikelola secara berkelanjutan memberikan keuntungan jangka panjang untuk lingkungan, kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian, yang sama-sama dinikmati oleh masyarakat setempat dan para pengunjung. Oleh karena itu penelitian mengenai pengembangan strategi pariwisata berkelanjutan menjadi penelitian yang menarik guna merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini akan membahas tentang **“STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PANTAI RANDUSANGA INDAH KABUPATEN BREBES”**.

1.2 Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Potensi Pantai Randusanga Indah belum dimaksimalkan dengan baik
2. Pengelolaan Pantai Randusanga Indah belum optimal, yang berdampak pada menurunnya kualitas objek wisata.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Pada Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pantai Randusanga Indah?
2. Bagaimana Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Pada Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pantai Randusanga Indah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengembangan pariwisata pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes.

1.4 Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Randusanga, Kabupaten Brebes.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu yang telah dipelajari, terutama terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Randusanga Indah, Kabupaten Brebes.

b. Bagi Pemerintah/Masyarakat

Supaya dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Randusanga Indah, Kabupaten Brebes.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti atau kelompok peneliti lain dalam bidang tertentu. Penelitian ini dapat mencakup studi literatur, eksperimen, survei, atau berbagai metode penelitian lainnya yang telah dilakukan sebelum waktu tertentu atau sebelum penelitian saat ini dilaksanakan. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal - jurnal.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun/ Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kanom & Darmawan (2021)/ ”Strategi Pengembangan Pantai Pulau Merah Banyuwangi Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan”	Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apa saja potensi dan masalah yang ada dalam mengembangkan Pantai Pulau Merah Banyuwangi sebagai tempat wisata yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga akan membuat strategi dan saran kebijakan yang paling tepat.	“Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pantai Pulau Merah Banyuwangi memiliki dua potensi utama, yaitu potensi alam serta sosial budaya. Namun, pengembangan destinasi ini masih menghadapi kendala berupa lemahnya manajemen destinasi dan kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan Pantai Pulau Merah sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, diterapkan beberapa strategi pengembangan. Strategi Strength-Opportunity (S-O) berfokus pada pengembangan daya tarik wisata dan peningkatan kualitas destinasi. Strategi Strength-Threat (S-T) menitikberatkan pada mitigasi bencana, pengembangan pariwisata berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment), serta penerapan konsep pariwisata berkelanjutan. Strategi Weakness-Opportunity (W-O) diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan promosi wisata, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Sementara itu, strategi Weakness-Threat (W-T) difokuskan pada pengembangan amenities dan fasilitas pendukung, serta penguatan kelembagaan dan manajemen destinasi.”

2.	Silviana (2020)/ “Pengelolaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan”.	Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai cara pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Pantai Carocok Painan, dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya.	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat lokal menuntut partisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata serta distribusi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya secara adil. Hal ini terutama berkaitan dengan penciptaan peluang kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa hambatan, salah satunya adalah perencanaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang belum berjalan secara optimal serta masih menghadapi kendala dalam tahap pengembangannya.”
3.	Pratiwi (2023)/ “Identifikasi 4A (Attraction, Amenity, Accessibility dan Ancillary) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung.”	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana empat aspek penting pariwisata, yaitu daya tarik, fasilitas, akses, dan layanan tambahan, diterapkan dalam upaya mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung.	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen utama 4A (<i>Attraction, Amenity, Accessibility dan Ancillary</i>) dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung yakni pada aspek <i>Attraction</i> , Pantai Tanjung Pendam menyajikan pemandangan laut, hamparan pasir putih dan banyak spot foto. Aspek <i>Amenity</i> , Pantai Tanjung Pendam memiliki fasilitas cukup lengkap seperti toilet, mushola, tempat parkir, restoran. Aspek <i>Accessibility</i> , untuk menuju Pantai Tanjung Pendam berbagai macam moda transportasi kendaraan umum dan lain - lain bisa diakses dengan mudah. Aspek <i>Ancillary</i> , pengelolaan Pantai Tanjung Pendam oleh Dinas Pariwisata. Adapun kendala yang dihadapi yaitu permasalahan kebersihan, fasilitas yang telah rusak, usang dan terbengkalai, aksesibilitas pada jaringan internet yang terbatas.”
4.	Horas (2023)/ “Implementasi Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pariwisata berkelanjutan	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kutuh memiliki peran besar dalam pengembangan pariwisata di Pantai Pandawa, dari tahap awal hingga kini menjadi destinasi yang dikenal luas oleh wisatawan. Partisipasi aktif masyarakat lokal, baik secara langsung maupun tidak

	Berbasis <i>Community-Based Tourism</i> Di Pantai Pandawa.”	yang melibatkan masyarakat di Pantai Pandawa sudah sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan No.14 Tahun 2016.	langsung, turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan pariwisata di kawasan ini. Pantai Pandawa sendiri memiliki potensi wisata yang sangat besar, terutama keindahan laut dan tebing kapurnya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, Pantai Pandawa telah menerapkan konsep sustainable tourism berbasis Community Based Tourism (CBT) hingga mencapai 88,25%, di mana penduduk lokal memainkan peran kunci dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di kawasan tersebut.”
5.	Sari (2022)/ “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Pantai Glagah Wangi Desa Tambak Bulusan.”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenali potensi wisata di Pantai Glagah Wangi dan membuat strategi pengembangan pariwisata yang tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati dalam jangka panjang.	“Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan pariwisata di Pantai Glagah Wangi, beberapa strategi yang direkomendasikan termasuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki pantai tersebut, memperkuat peran pemerintah dalam mendukung pengembangan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian dan pengembangan pantai, serta meningkatkan persepsi positif wisatawan terhadap Pantai Glagah Wangi di Desa Tambakbulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.”
6.	Fajriah (2014)/ “Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan).”	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menilai perkembangan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan di wilayah pesisir Wonokerto, Kabupaten Pekalongan.	“Pantai Wonokerto memiliki potensi wisata yang besar, namun sarana dan prasarana pendukungnya masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata pesisir ini perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan infrastruktur pariwisata pesisir yang berkelanjutan harus berlandaskan pada empat elemen utama dalam teori keberlanjutan, yakni aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Keempat elemen ini harus berjalan selaras agar tidak menimbulkan ketimpangan yang dapat berdampak negatif bagi generasi mendatang.”

7.	Anjani (2024)/ “Penilaian Ekowisata Mangrovesari di Kabupaten Brebes melalui Studi Kelayakan serta Perumusan Strategi Pengembangannya.”	Tujuan Penelitian ini untuk meninjau kelayakan, mengidentifikasi potensi, dan menetapkan strategi prioritas dalam pengembangan destinasi ekowisata Mangrovesari di Kabupaten Berbes.	“Penelitian ini menggunakan metode Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO ODTWA) untuk menilai kelayakan pengembangan ekowisata, sementara analisis potensi dilakukan dengan metode Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Penentuan strategi prioritas ditetapkan berdasarkan hasil analisis Internal Factor Analysis Strategy-External Factor Analysis Strategy (IFAS-EFAS). Hasil analisis ADO ODTWA menunjukkan bahwa ekowisata Mangrovesari memiliki kelayakan tinggi untuk dikembangkan lebih lanjut, dengan nilai sebesar 80%. Potensi serta strategi pengembangannya telah dipetakan dalam matriks SWOT, sedangkan analisis IFAS-EFAS menunjukkan koordinat (0,710; 0,110) yang berada pada kuadran I. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi Strength-Opportunity (SO) menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekowisata Mangrovesari. Strategi SO ini mencakup optimalisasi dan peningkatan kualitas objek wisata, perbaikan aksesibilitas, penguatan kerja sama dalam implementasi rencana pengembangan, pemanfaatan media informasi secara maksimal, serta peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan.”
8.	Hartini (2023)/ “Smart Village Melalui Desa Wisata Terpadu Di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”	Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi potensi dalam pengembangan “ <i>Smart Village</i> ” melalui Desa Wisata Terpadu.	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran krusial dalam pembangunan, khususnya dalam pengembangan desa wisata. Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui sosialisasi serta revitalisasi kelompok BUMDes dan Pokdarwis, disertai dengan penguatan UMKM yang sudah ada melalui pelatihan manajemen pemasaran dan peningkatan modal dengan membentuk pra-koperasi syariah. Namun, program ini menghadapi kendala, terutama karena para petani belum sepenuhnya mendukung konsep wisata yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan mereka yang mendesak dan tuntutan biaya yang harus segera

			dipenuhi, sehingga masih ada anggapan bahwa sektor pariwisata tidak dapat memberikan kontribusi secara instan.”
9.	Rukmanah (2023)/ “Pengaruh Strategi Pengembangan dan Potensi Wisata terhadap Daya Tarik Wisata (Studi Empiris pada Pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes).”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana strategi pengembangan dan potensi wisata mempengaruhi daya tarik wisata, baik secara individu maupun dalam kombinasi.	“Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang mencakup uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel strategi pengembangan memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7,138 > 1,661$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti strategi pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik wisata. Hal yang sama juga berlaku pada variabel potensi wisata, dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,152 > 1,661$) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga potensi wisata turut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik wisata. Secara simultan, strategi pengembangan dan potensi wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik wisata, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel ($79,213 > 3,939$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, kedua variabel tersebut secara bersama-sama memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan daya tarik wisata.”
10.	Muakhor (2008)/ “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Randusanga Indah Kabupaten Brebes Sebagai Objek Wisata Unggulan.”	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan Pantai Randusanga Indah dan menjadikannya sebagai destinasi wisata utama.	“Hasil penelitian menunjukkan strategi pengembangan yang akan diterapkan oleh Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah, termasuk strategi untuk produk wisata, pasar, dan kelembagaan dan pengelolaan. Strategi pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan sisi pasokan produk wisata. Diharapkan untuk mengembangkan produk wisata dengan inovasi sehingga wisatawan tertarik dan tidak bosan dengan produk wisata yang telah ditawarkan sebelumnya. Selain itu, pengembangan produk wisata ini diharapkan dapat melibatkan investor swasta, komunitas, dan lembaga lain yang terkait dengan pengembangan objek wisata.”
11.	Devica (2021)/ “Strategi Pemberdayaan Kelompok	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis	“Hasil temuan utama pada penelitian ini yaitu membahas strategi pengembangan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Gerhana

	Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Pantai Terentang di Desa Terentang III, Kabupaten Bangka Tengah.”	strategi pengembangan oleh Pokdarwis dalam upaya megembangkan pariwisata pantai terentang oleh Kelompok Sadar Wisata Gerhana Desa Terentang III Kabupaten Bangka Tengah.	dalam upaya mengembangkan pariwisata Pantai Terentang. Selain itu juga membahas tentang pengembangan pariwisata melalui sentuhan ekonomi, beberapa peran Kelompok Sadar Wisata Gerhana serta tantangan Pokdarwis Gerhana sebagai pelaku wisata.”
12.	Chaerunissa & Yuniningsih (2020)/ “Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang.”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Wonopolo dan faktor penghambat dan pendorong.	“Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo belum dikatakan optimal. Hal tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya komponen-komponen pengembangan pariwisatanya. Pengelolaan atraksi belum optimal. Dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar. Tidak mudah bagi masyarakat Desa Wonolopo untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan rutin. Akibatnya, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola destinasi wisata. Desa Wisata Wonolopo memiliki akses yang buruk. Selain itu, pengelola Desa Wisata Wonolopo masih kurang bekerja sama, terutama dengan CSR.”
13.	Safitri & Utami (2020)/ “Persepsi Pengunjung Tentang Sarana Wisata Di Objek Wisata Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi.”	Penelitian ini bertujuan pada pengumpulan data mengenai pendapat pengunjung tentang fasilitas yang ada di Pantai Pulau Merah Banyuwangi, dan juga untuk menginvestigasi apakah ada perbedaan	“Hasil dari penelitian ini adalah Persepsi pengunjung mengenai sarana pada objek wisata Pulau Merah didapatkan hasil bahwa sarana yang ada dalam kriteria baik, akan tetapi kamar mandi dan mushola diperlukan adanya tindakan perbaikan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia pengunjung terhadap persepsi tentang fasilitas/sarana yang ada di pantai Pulau Merah. Tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pengunjung terhadap persepsi tentang fasilitas/sarana yang ada di pantai Pulau Merah”.

		persepsi berdasarkan usia dan jenis kelamin pengunjung.	
14.	Yetti (2021)/ “Pengaruh Strategi Promosi dan Fasilitas Terhadap Pemilihan Tempat Wisata Anai Land.”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi promosi dan fasilitas terhadap pemilihan tempat wisata anai land.	“Hasil dari penelitian ini dengan menggunakan pengumpulan data dilakukan dengan melalui kuesioner yang diukur dengan skala likert. Menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan tempat wisata yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,00, sedangkan fasilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan tempat wisata yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,801.”
15.	Pebriana (2021)/ “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019)”	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dalam upaya mengembangkan pariwisata, dengan sasaran meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2019.	“Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka belum optimal dikarenakan belum tercapainya target pendapatan asli daerah tahun 2019 dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, mayoritas destinasi wisata milik TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) dan perhutani sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan, dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta belum diterapkannya sanksi bagi yang melanggar.”
16.	Fernandez-Abila (2024)/ “Characterizing the sustainable tourism development of small islands in the Visayas, Philippines.”	Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji pengembangan pariwisata di empat pulau kecil di Filipina dengan menggunakan lima	“Hasil penelitian tentang karakterisasi pengembangan pariwisata berkelanjutan di pulau-pulau kecil di Visayas, Filipina, memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai aspek pariwisata di destinasi pulau-pulau ini. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di pulau-pulau kecil dan perlunya perencanaan yang komprehensif, tata

		elemen kunci keberlanjutan.	kelola, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang pariwisata di destinasi-destinasi tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat untuk memandu pengambilan keputusan di masa depan dan inisiatif perencanaan dalam pariwisata pulau-pulau kecil.”
17.	Trišić (2024)/ “The Impact of Sustainable Tourism on Resident and Visitor Satisfaction—The Case of the Special Nature Reserve “Titelski Breg”, Vojvodina. <i>Sustainability (Switzerland)</i> . ”	Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji kondisi pariwisata berkelanjutan (SuT) di Titelski Breg (TB) dan dampak SuT terhadap kepuasan responden (SoR).	“Hasil penelitian ini Penerapan model Prism of Sustainability (PoS) menunjukkan bahwa Titelski Breg dinilai sebagai tujuan wisata yang penting untuk pariwisata berkelanjutan oleh penduduk dan pengunjung. Penduduk dan pengunjung memberikan penilaian yang relatif sama untuk keempat dimensi keberlanjutan - lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Kedua kelompok menilai dimensi kelembagaan paling rendah, menekankan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan fasilitas untuk meningkatkan keberlanjutan.”
18.	Samal (2024)/ “Stakeholder engagement in advancing sustainable ecotourism: an exploratory case study of Chilika Wetland.”	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak ekowisata terhadap masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi.	“Temuan-temuan menggarisbawahi potensi restorasi ekosistem Chilika dan mitigasi dampak negatif dari wisatawan dengan tata kelola ekowisata yang efektif. Kebutuhan akan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk pengelolaan ekowisata yang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh contoh Mangalajodi, yang menjadi contoh keberhasilan ekowisata yang dipimpin oleh masyarakat. Namun demikian, prasyarat tertentu, seperti penyebaran pengetahuan, pelatihan, dukungan keuangan, promosi budaya, infrastruktur ramah lingkungan, dan komitmen terhadap konservasi, telah diakui sebagai hal yang diperlukan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang dalam inisiatif ekowisata.”
19.	Gradinac (2016)/ “Development of sustainable	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi, melalui	“Hasil penelitian menyoroti pentingnya model ekowisata dan keterlibatan pemangku kepentingan di kawasan lindung untuk pembangunan berkelanjutan. Studi ini membahas tantangan yang dihadapi dalam

	tourism in the case of nature park Karwendel, Austria.”	pengalaman dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Taman Wisata Alam Karwendel.	menerapkan konsep ekowisata dan pembangunan berkelanjutan tanpa kemauan politik untuk tujuan lingkungan dan sosial budaya. Konsep pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyelaraskan aspek ekonomi, ekologi, dan budaya, menekankan konservasi alam dan pembangunan yang bertanggung jawab.”
20.	Ayu Rustini (2022)/ “Development of Sustainable Tourism Based on Local Community Participation.”	Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi peran masyarakat lokal dilibatkan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.	Hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti kontribusi ide melalui curah pendapat, partisipasi dalam kerja fisik, serta sumbangsih keterampilan dan keahlian, dan partisipasi harta benda. Untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat lokal dapat berjalan, pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan rencana.
21.	Johnston (2015)/ “Sustainable tourism development.”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gagasan utama dari pariwisata berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata.	“konsep pariwisata berkelanjutan, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Menciptakan strategi pariwisata berkelanjutan di suatu wilayah dapat meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. Mengelola pariwisata secara bertanggung jawab dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal, sehingga menghasilkan penghematan biaya, daya tarik pelanggan, dan peningkatan reputasi perusahaan pariwisata. Secara keseluruhan, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pariwisata dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang dan pelestarian destinasi.”

Kanom & Darmawan (2021) melakukan penelitian untuk mencari tahu potensi, masalah, strategi, dan rekomendasi kebijakan yang terbaik dalam mengembangkan Pantai Pulau Merah Banyuwangi. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa pantai ini kaya akan potensi alam dan sosial budaya. Akan tetapi, ada beberapa hambatan, yaitu pengelolaan destinasi yang belum optimal dan kurangnya kerja sama. Kanom & Darmawan dalam merumuskan rekomendasi menggunakan teknik analisis SWOT. Hal ini sejalan dengan penelitian Anjani (2024) dalam analisis potensi pengembangan wisata Mangrove sari di Kabupaten Berbes dilakukan menggunakan metode *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT). Berbeda dengan peneliti sebelumnya, Pratiwi (2023) dalam penelitiannya “*Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung*” mengidentifikasi 4A (*Attraction, Amenity, Accessibility dan Anciliary*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada aspek *Attraction*, Pantai Tanjung Pendam menyajikan pemandangan laut, hamparan pasir putih dan banyak spot foto. Aspek *Amenity*, Pantai Tanjung Pendam memiliki fasilitas cukup lengkap seperti toilet, mushola, tempat parkir, restoran. Aspek *Accessibility*, untuk menuju Pantai Tanjung Pendam berbagai macam moda transportasi kendaraan umum dan lain - lain bisa diakses dengan mudah. Aspek *Anciliary*, pengelolaan Pantai Tanjung Pendam oleh Dinas Pariwisata.

Menurut penelitian Silviana (2020), agar pariwisata berkelanjutan berhasil, masyarakat setempat harus ikut serta dalam kegiatan wisata dan merasakan manfaat ekonomi, sosial, atau budaya secara adil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2022), dalam mengidentifikasi potensi

dan menyusun strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan Pantai Glagah Wangi bisa dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian dan pengembangan pantai. Lebih dari itu, hasil penelitian dari Ayu Rustini (2022) mengungkapkan bahwa Masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan berbagai cara, seperti memberikan ide, membantu dengan tenaga, menyumbangkan keahlian, dan memberikan bantuan materi.

Horas (2023), menerapkan konsep *sustainable tourism* berbasis *Community Based Tourism* dengan penduduk lokal yang berperan penting dalam mengembangkan daya tarik wisata di Pantai Pandawa. Sedangkan Hartini (2023), dalam penelitian Smart Village Melalui Desa Wisata Terpadu Di Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes mengungkapkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam pengembangan desa wisata desa wisata bisa dilakukan melalui sosialisasi dan penyegaran kelompok BUMDes dan Pokdarwis, serta penguatan UMKM. Devica (2021) dalam Upaya Pengembangan Pariwisata Pantai Terentang di Desa Terentang III, Kabupaten Bangka Tengah juga melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Fernandez-Abila (2024) menggarisbawahi pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di pulau-pulau kecil dan perlunya perencanaan yang komprehensif, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat Agar tempat-tempat wisata tetap menarik dan bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Sejalan dengan penelitian tersebut, Johnston (2015) menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam perencanaan dan pengelolaan

pariwisata untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

Fajriah (2014) meneliti “pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata pantai yang berkelanjutan di Kawasan Pesisir Wonokerto Kabupaten Pekalongan”. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Pantai Wonokerto memiliki potensi wisata yang sangat baik. Akan tetapi, fasilitas pendukung untuk aktivitas wisata masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Untuk menjaga kelestarian dan keindahan Pantai Wonokerto, perlu dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata pesisir. Upaya ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Safitri & Utami (2020) yang meneliti “Persepsi Pengunjung Tentang Sarana Wisata Di Objek Wisata Pantai Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi”. Berdasarkan penelitian, pengunjung menilai fasilitas di objek wisata Pulau Merah secara keseluruhan sudah baik. Namun, ada saran perbaikan untuk kamar mandi dan mushola agar kenyamanan pengunjung semakin meningkat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut Samal (2024) dalam penelitian “*Stakeholder engagement in advancing sustainable ecotourism: an exploratory case study of Chilika Wetland*”. Temuan-temuan menggarisbawahi potensi restorasi ekosistem Chilika dan mitigasi dampak negatif dari wisatawan dengan tata kelola ekowisata yang efektif. Kebutuhan akan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk pengelolaan ekowisata yang efektif. Serupa yang dengan penelitian sebelumnya, Gradinac (2016) dalam

penelitian “*Development of sustainable tourism in the case of nature park Karwendel*”, Austria menyoroti pentingnya model ekowisata dan keterlibatan pemangku kepentingan di kawasan lindung untuk pembangunan berkelanjutan.

1.5.2 Administrasi Publik

Konsep administrasi publik sebenarnya telah ada sejak lama, tetapi dahulu lebih dikenal dengan istilah administrasi negara. Kata "publik" sendiri sering dikaitkan dengan makna “negara”, “umum”, dan “masyarakat”. Pergeseran istilah dari negara ke publik terjadi karena beberapa faktor (Marliani, 2018):

1. Perkembangan di bidang ekonomi, politik, dan budaya yang menyebabkan keterbatasan pemerintah dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
2. Dampak globalisasi yang menuntut peningkatan daya saing di berbagai sektor, sehingga peran pemerintah semakin dikurangi melalui proses debirokratisasi dan deregulasi.
3. Dorongan menuju sistem yang lebih demokratis, yang mengakibatkan semakin banyak organisasi masyarakat yang ingin terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
4. Munculnya organisasi hibrida, yaitu kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta.

Administrasi Publik, juga dikenal sebagai Administrasi Negara, merupakan bidang ilmu sosial yang mengkaji tiga aspek utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta topik yang terkait dengan urusan publik seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika dalam penyelenggaraan

negara (Panjaiitan & Pardede, 2021). Administrasi publik menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik (Malik, 2020).

Meskipun mempelajari organisasi, administrasi publik berbeda dari ilmu manajemen. Di mana manajemen memusatkan pada pengelolaan organisasi swasta, administrasi publik mempelajari organisasi publik atau pemerintahan, termasuk departemen dan dinas, dari tingkat kecamatan hingga tingkat pusat (Panjaiitan & Pardede, 2021).

Dalam pengembangan pariwisata, administrasi publik memiliki peran yang krusial. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata, kerja sama antara pihak-pihak terlibat sangat diperlukan. Administrasi publik dapat berperan dengan merumuskan kebijakan dan melaksanakan fungsi manajemen guna mencapai tujuan pengembangan secara efisien dan efektif.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Dalam konteks tatanan pemerintahan, terdapat konsepsi yang bertentangan antara pemerintahan yang didasarkan pada birokrasi dan yang berorientasi pada demokrasi. Periode kolonial-feodal menciptakan dinamika interaksi antara yang diperintah dan pemerintahan yang disebut sebagai "birokrasi," yang menghasilkan model layanan publik yang beroperasi di bawah "kedaulatan birokrat" dan bukan "kedaulatan rakyat." Birokrat pemerintahan seringkali menempati peran "sang tuan" daripada sebagai "sang hamba" atau pelayan. Harapan dalam Pelayanan Publik adalah agar memiliki makna ideal bahwa institusi pelayanan publik akan mengalami pergeseran dari peran "sang tuan" menjadi "sang pelayan," atau dari

yang dilayani menjadi yang melayani. Paradigma Pelayanan Publik juga pernah mengalami pergeseran, yaitu:

a. Paradigma pertama: Dikotomi Administrasi Politik (1900–1926)

Dasar pemikiran administrasi politik adalah konsep pemisahan antara kegiatan politik dan administrasi dalam pemerintahan. Tujuannya adalah agar pemerintahan berjalan lebih efisien dan efektif. Konsep ini sejalan dengan model administrasi umum, yang menekankan penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dalam manajemen, baik di sektor publik maupun swasta (Basheka (2012) Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh Woodrow Wilson dalam makalah manifestonya pada tahun 1897, yang menggarisbawahi empat standar untuk administrasi publik yang efisien. Selain mendorong evaluasi berbasis prestasi, kriteria-kriteria ini mencakup pemisahan antara politik dan administrasi. Hal ini mencakup perbandingan antara cara kerja organisasi politik dan perusahaan swasta, upaya meningkatkan efisiensi dengan menerapkan praktik dan pola pikir bisnis dalam kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pelatihan pegawai negeri. (Basheka, 2012).

b. Paradigma kedua: Prinsip - Prinsip Administrasi, 1927–1937

Prinsip-prinsip paradigma administrasi, yaitu maju ke arah orientasi administratif, penyempurnaan administrasi publik, bahkan administrasi/manajemen hingga ke tingkat keilmuan. Dengan demikian, diyakini bahwa ada prinsip-prinsip manajemen ilmiah tertentu yang dapat diandalkan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajerial merupakan hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip ini bersifat ilmiah sehingga dapat diterapkan di berbagai konteks manajemen, tanpa

memandang struktur organisasi, industri, budaya, jenis kegiatan, lingkungan, atau misi. Gulick dan Urwick (1937) mengidentifikasi tujuh prinsip administrasi yang dikenal dengan akronim POSDCORB, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran merupakan klimaks dari tahap ini (Basheka,2012).

Dua paradigma awal di atas mewakili apa yang biasanya digambarkan sebagai model administrasi publik tradisional yang berfokus pada karir, pegawai negeri yang kompeten secara netral yang bekerja dalam struktur otoritas hierarkis sebagai cara terbaik, baik dalam istilah normatif maupun empiris, untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. (Derlin,1999; Peters,2003). Secara lebih rinci memberikan fitur atau asumsi model tradisional yang disebutkan oleh Peters (2003, hlm. 8-9) yang dikutip dari Walsh dan Stewart (1992) terdiri dari Asumsi swasembada, Asumsi pengendalian langsung, Asumsi akuntabilitas ke atas, Asumsi keseragaman, Sebuah asumsi dari sistem pelayanan sipil. Paradigma lain menentang asumsi-asumsi ini dan dampaknya yang dimulai dengan dua tahap berikutnya.

c. Paradigma ketiga: Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik, 1950–1970

Henry (1975) mengatakan “paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970) melihat pemberontakan ilmu politik untuk merebut kembali administrasi publik”. Pada saat yang sama, para ahli teori manajemen cenderung semakin menekankan disiplin. Basheka (2012) berpendapat periode ini sebagai periode dikotomi yang mengempis dan prinsip yang meluas. Dengan demikian, dikotomi politik dan administrasi dihapuskan atas dasar bahwa administrasi dan

politik tidak dapat dipisahkan dalam dunia administrasi yang sebenarnya. Basheka mendefinisikan politik sebagai partisan dan korupsi yang berkembang hingga mencakup pembuatan kebijakan publik. Dikotomi praktis tidak bisa dipertahankan di posisi ini.

d. Paradigma keempat: Paradigma Administrasi Publik Sebagai Manajemen, 1956–1970 Henry (1975)

Paradigma keempat menggambarkan administrasi publik sebagai manajemen dari tahun 1956 hingga 1970. Ini hampir sejalan dengan 3 yang mengatakan bahwa itu tidak menguntungkan Ilmu politik, sebagai hasil integrasi pandangan beberapa akademisi mengenai pengelolaan administrasi publik, menunjukkan bahwa pada tahap ketiga dan keempat, dua disiplin yang saling berebut dominasi dalam administrasi publik nyaris tidak memberikan kesempatan atau perhatian kepada ilmu pengetahuan baru maupun bidang studi yang diakui oleh para akademisi perintis. Selama periode paradigmatik yang dikenal sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik atau Administrasi Publik sebagai Manajemen Publik (dari tahun 1970 hingga 1990), disiplin ini mampu bertahan dari serangan hebat tersebut, seperti yang dicatat oleh Henry (1975).

e. Paradigma kelima: Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik, (1970–sekarang) (NPM)

Fokus teori organisasi saat ini adalah tentang bagaimana dan mengapa organisasi berfungsi, mengapa individu bertindak seperti yang mereka lakukan, dan bagaimana dan mengapa pilihan dibuat. Oleh karena itu, teori organisasi dan ilmu manajemen lebih penting dalam administrasi negara saat ini. Kesejahteraan dan

kepentingan publik adalah lokus dari paradigma ini. Pada tahap ini, ada upaya untuk menjadikan administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Namun saat melakukan ini, Fokus administrasi publik bergeser dari hierarki dan birokrasi ke pasar dan organisasi sektor swasta. Sebagai hasilnya, paradigma “Manajemen Publik Baru (New Public Management/NPM)” menggantikan pendekatan administrasi publik yang tradisional. Menurut Peters (2003, hal. 9), ini mencerminkan perubahan paradigma yang nyata, berbeda dengan berbagai paradigma atau fase evolusi administrasi publik yang diidentifikasi oleh Henry (1975). Ia menyatakan bahwa lima pilar dari model konvensional merupakan "seperangkat gagasan yang dengan baik menggambarkan bagaimana pemerintah melaksanakan tugas mereka di sektor publik sebelum reformasi NPM," seperti yang dikemukakan oleh Walsh dan Stewart (1992). Dengan demikian, kita memiliki tiga cara pandang yang terpisah dalam administrasi, yaitu: pandangan Konvensional atau Tradisional, pandangan NPM, dan pandangan Tata Kelola, menunjukkan perubahan paradigma yang krusial, bukan sekadar tahap-tahap spesifik yang dicatat oleh Henry (1975).

NPM seperti pendekatan atau paradigma sebelumnya, muncul untuk menghadapi masalah inefisiensi yang sama dalam sistem administrasi. Itu berasal dari perpaduan teori ekonomi dan teknik manajemen sektor swasta. Ajarannya berlabuh pada penarikan negara. Asumsi lain dari administrasi publik tradisional seperti klaim birokrasi Weberian sebagai struktur yang paling tepat untuk administrasi yang efektif semuanya ditentang oleh paradigma ini. Administrasi publik tradisional atau konvensional pada dasarnya menganggap pemerintah sendiri

sebagai aktor yang otonom dan otoritatif melalui struktur dan proses birokrasi, hierarkis, dan prosesnya sejauh menyangkut layanan publik; paradigma NPM adalah pergeseran untuk menggunakan sektor swasta. Untuk Petrus (2003), seluruh gagasan manajemen generik menandakan paradigma NPM. Pergeseran paradigma ke pendekatan ini adalah dari Administrasi Publik Konvensional dan secara bertahap memberi jalan bagi paradigma Tata Kelola.

f. Paradigma keenam: Governance atau Pemerintahan, 1990–sekarang

Govenance merupakan tujuan utama dari pemerintahan dan administrasi publik. Istilah "Goverance" sering digunakan untuk merujuk pada pemerintah atau menggambarkan operasionalnya. Meskipun konsep ini bukanlah hal yang baru, pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, istilah ini mendapatkan makna dan penggunaan baru. Governance dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan pengaruh atau wewenang pemimpin politik demi kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Proses ini sangat kompleks, di mana berbagai segmen masyarakat memiliki pengaruh dan terlibat dalam penerapan serta distribusi hukum yang berdampak langsung pada hubungan antar lembaga dan individu, serta pada kemajuan sosial dan ekonomi. (Tamayao, 2014).

Namun model tata kelola ini memiliki orientasi asal usul dan hubungan konseptual yang serupa dengan NPM, sehingga dianggap berhasil. Kedua aspek administrasi publik ini muncul dari ideologi neo-liberal yang dianut oleh sebagian besar negara "*Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*" pada akhir tahun 1970an dan awal tahun 1980an. Menurut Peters (2003, p. 18), kedua model ini dalam beberapa hal sejalan, keduanya berupaya untuk

mengganggu sistem pemerintahan yang hierarkis dan bersifat top-down yang diwarisi dari masa lalu.

Paradigma ke enam atau Governance relevan dengan penelitian ini. Pengembangan pariwisata dalam paradigma Good Governance dan partisipasi masyarakat menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sektor pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik bisa diartikan sebagai upaya pemerintah atau lembaga publik dalam mengelola sektor-sektor publik. Upaya ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, penyusunan strategi, dan evaluasi terhadap berbagai sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan (Iwan Satibi, 2012). Manajemen publik adalah cara untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat umum atau publik secara efektif (Sabeni & Setiamandani, 2020). Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik merupakan bagian integral dari manajemen publik. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner yang mengkaji berbagai elemen umum dalam organisasi (Keban dalam Nahdiyah, 2013; (Afrizal & Oktariyanda, 2021).

Prinsip dasar yang mendasari efektivitas pelaksanaan manajemen publik mencakup beberapa aspek (Iwan Satibi, 2012), yaitu:

1. akuntabilitas
2. transparansi
3. responsivitas
4. efektivitas
5. efisiensi
6. adaptabilitas
7. rasionalitas
8. profesionalisme

Dalam mengembangkan destinasi wisata, manajemen publik sangat penting. Ini termasuk dalam proses pembangunan Pantai Randusanga Indah di Kabupaten Brebes. Untuk menjamin bahwa proses pengembangan berjalan dengan baik, prinsip-prinsip manajemen sangat penting. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian yang sistematis, dan pengendalian untuk menjamin keberhasilan proyek serta penerapan strategi terbaik untuk memaksimalkan potensi wisata pantai. Untuk meningkatkan hasil dalam sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya, evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan. Manajemen strategis adalah cabang manajemen yang harus digunakan. Ini berfungsi untuk membuat rencana strategis untuk pengembangan kebijakan wisata yang berkelanjutan dan berhasil.

1.5.5 Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan rangkaian keputusan serta tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Studi lingkungan yang komprehensif, perancangan strategi yang mencakup perencanaan jangka panjang dan strategis, pelaksanaan strategi, serta penilaian dan pengendalian untuk mengukur efektivitas adalah semua langkah dalam proses tersebut. Tujuan utama dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang serta risiko eksternal, sambil mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan (Wheelen & Hunger, dalam Edison & Komariyah (2023) .

Wright, Kroll, dan Parnell dalam Sari (2018) “mendefinisikan manajemen strategis sebagai proses berkelanjutan dari penentu misi dan tujuan organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan internal, kekuatan dan kelemahan, merumuskan strategi yang tepat, menerapkan strategi-strategi, dan mengarahkan kontrol strategis untuk memastikan strategi organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya”.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen strategis melibatkan serangkaian pilihan dan pedoman penting yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh setiap karyawan di perusahaan. Fokus utama manajemen strategis adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi, di mana inti dari proses ini melibatkan identifikasi tujuan serta sumber daya yang dimiliki, serta bagaimana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai sasaran strategis (Suherman, 2022).

Secara sederhana, manajemen strategis adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang melibatkan semua bagian organisasi untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan penyelarasan berbagai fungsi, seperti manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian, dan sistem informasi, agar organisasi dapat mencapai kesuksesan. (David dan David, dalam (Khaerul Anwar, Nia Kurniawati, 2022)).

1.5.6 Perencanaan Strategis

Analisis manajemen strategi memerlukan empat langkah penting: pertama, melihat kondisi lingkungan; kedua, menyusun rencana strategi; ketiga, menjalankan strategi tersebut; dan keempat, menilai dan mengontrol pelaksanaan strategi. (Hunger dan Wheelen, 2004: 9-11 dalam Alkadafi (2020)).

Menurut Bryson dalam Budiono (2024), “manajemen strategi dalam konteks organisasi publik melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan tujuan strategis, serta penyusunan rencana yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan merespons perubahan secara efektif. Manajemen strategi bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya bertahan tetapi juga unggul dalam memenuhi misi dan visinya. Manajemen strategi di sektor publik mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan jangka panjang, alokasi sumber daya, pengelolaan risiko, dan evaluasi kinerja”.

Bryson (2007) dalam Silitonga (2019) mengemukakan delapan tahapan *strategic planning for public and nonprofit organizations* yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.

Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting (decision makers) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting. Salah satu tugas pemrakarsa adalah menetapkan secara tepat siapa saja yang tergolong orang-orang penting pembuat keputusan. Tugas berikutnya adalah menetapkan orang kelompok, unit, atau organisasi manakah yang harus dilibatkan dalam perencanaan.

2. Memperjelas mandat organisasi.

Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.

Bagi perusahaan atau lembaga pemerintah, atau bagi organisasi nirlaba, hal ini berarti organisasi harus berusaha memenuhi kebutuhan sosial dan politik yang dapat diidentifikasi. Namun menetapkan misi lebih dari sekedar mempertegas keberadaan organisasi. Memperjelas maksud dapat mengurangi banyak sekali konflik yang tidak perlu dalam suatu organisasi dan dapat membantu menyalurkan diskusi dan aktivitas secara produktif.

4. Menilai lingkungan eksternal.

Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Sebenarnya, faktor “didalam” merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi dan faktor “diluar” adalah faktor yang tidak terkontrol oleh

organisasi (Preffer dan Salancik, 1978). Beberapa faktor yang tidak berasal dari luar organisasi diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor politik, faktor stakeholder, faktor partisipasi masyarakat, dan faktor teknologi.

Di dalam konsep Sustainable Development, menurut Grundy dalam (Sutiarso, 2018) terdiri dari 3 (tiga) elemen system yang menyangkut: 1. Keberlanjutan ekologi /lingkungan 2. Keberlanjutan sosial 3. Keberlanjutan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor lingkungan eksternal, maka peneliti mengidentifikasi faktor eksternal dalam strategi pengembangan pariwisata antara lain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor politik, faktor stakeholder, faktor partisipasi masyarakat, faktor teknologi dan faktor lingkungan.

5. Menilai lingkungan internal.

Agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi harus memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process) dan kinerja (outputs). Visi misi organisasi, pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia merupakan komponen-komponen lingkungan internal.

Syamsuridjal (1997), Sinaga (2010), dan Nasri (2023) mengemukakan bahwa pengembangan suatu objek wisata bergantung pada beberapa unsur penting. Pertama, Atraksi Wisata yang mencakup segala ciri khas atau keunikan yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kedua,

Aksesibilitas, yang merujuk pada kemudahan dalam menjangkau lokasi wisata tersebut. Ketiga, Fasilitas Pendukung, yaitu berbagai sarana seperti akomodasi dan restoran yang tersedia di sekitar objek wisata. Terakhir, terdapat Kelembagaan, yang melibatkan lembaga atau organisasi yang mengelola dan mengembangkan objek wisata tersebut.

Untuk mengidentifikasi lingkungan internal dalam sebuah pengembangan pariwisata, maka peneliti mengintegrasikan beberapa komponen antara lain: visi dan misi organisasi, anggaran/pendanaan, sumber daya manusia (SDM), atraksi/ daya tarik, aksesibilitas, dan fasilitas.

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.

Secara khas, perencanaan itu merupakan masalah yang sangat penting bahwa isu-isu strategis dihadapi dengan cara terbaik dan efektif jika organisasi ingin mempertahankan kelangsungan hidup dan berhasil baik. Organisasi yang tidak menanggapi isu strategis dapat menghadapi akibat yang tak diinginkan dari ancaman, peluang yang lenyap, atau keduanya.

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda-beda karena tingkat, fungsi dan kerangka waktu.

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan.

Langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

1.5.7 Analisis SWOT

Menurut Suriono (2022), analisis SWOT adalah proses untuk mengidentifikasi kesesuaian strategis antara peluang yang ada pada faktor eksternal dan internal perusahaan, sambil mempertimbangkan ancaman yang ada di sekitar maupun di luar perusahaan. Menurut Rangkuti dalam (Nafi'ah & Suryaningsih, 2017), Dalam membuat strategi perusahaan, analisis SWOT adalah alat yang berguna. Alat ini membantu kita menemukan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), sehingga kita bisa membuat rencana yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

1. Kekuatan (*strength*) merupakan keadaan yang menguntungkan yang saat ini dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, atau ide bisnis. Analisis dilakukan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh organisasi tersebut, yaitu elemen-elemen yang mendukung perkembangan pariwisata dan membantu untuk menjadi lebih tangguh serta kompetitif dalam menghadapi kemajuan pariwisata di masa mendatang.
2. Kelemahan (*weakness*) adalah kekurangan yang terdapat dalam organisasi, yang akan dianalisis untuk mengidentifikasi semua faktor yang merugikan atau tidak memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan objek wisata.

3. Peluang (*opportunities*) adalah keadaan yang akan muncul dan berkembang di masa depan; keadaan ini berasal dari sumber-sumber eksternal yang berkaitan dengan pariwisata.
4. Ancaman (*threats*) adalah situasi yang dapat menghambat tujuan organisasi yang berasal dari faktor eksternal.

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis SWOT, terdapat alat yang bisa digunakan yaitu Matriks SWOT. Menurut Rangkuti dalam (Dwijatenaya et al., 2021), matriks SWOT dapat digunakan untuk menggambarkan cara menghadapi faktor peluang dan ancaman dengan menyesuaikan elemen kekuatan dan kelemahan yang ada. Dengan menggunakan matriks ini, terdapat empat alternatif strategi yang mungkin dapat diambil. Berikut adalah matriks analisis SWOT:

Tabel 1.6 Matriks Analisis SWOT

Internal	<i>STRENGTH</i> (S)	<i>WEAKNESS</i> (W)
Eksternal	Menentukan beberapa faktor yang menjadi kekuatan internal	Menentukan beberapa faktor yang menjadi kelemahan internal
<i>OPPORTUNITIES</i> (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Menentukan beberapa faktor yang menjadi peluang	Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
<i>THREATS</i> (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Menentukan beberapa faktor yang menjadi ancaman	Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Sumber: Rangkuti dalam (Dwijatenaya et al., 2021)

1. Strategi S-O

Strategi Strengths-Opportunities (S-O) adalah pendekatan strategis yang memaksimalkan potensi kekuatan untuk menggambarkan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara yang paling efektif.

2. Strategi S-T

Strategi Strengths-Threats (S-T) adalah pendekatan strategis yang menggunakan keunggulan internal untuk mengurangi dampak dari ancaman yang mungkin timbul.

3. Strategi W-O

Strategi Weaknesses-Opportunities (W-O) adalah Strategi yang harus dipertimbangkan untuk mengatasi masalah internal organisasi dan memaksimalkan potensi dari peluang yang tersedia.

4. Strategi W-T

Strategi Weaknesses-Threats (W-T) adalah pendekatan strategis yang didasarkan pada tindakan defensif, dengan tujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang mungkin terjadi.

1.5.8 Pariwisata

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Sedangkan Kepariwisataan, menurut Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, adalah

“berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin dan muncul sebagai wujud kebutuhan setiap individu dan negara, serta interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha” (Kementrian Pariwisata, 2009)

Suwantoro dalam (Supriyadi, 2020) mengartikan pariwisata sebagai: “suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Keseluruhan kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan”. Soekadji (1996:86) mengidentifikasi tiga peluang pariwisata yang mungkin, yaitu:

1. Potensi dan modal alam,
2. Potensi dan modal budaya,
3. Potensi dan modal manusia.

1.5.9 Pengembangan Pariwisata

Menurut Yoeti (1987: 2-3), pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk mengunjunginya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah karakteristik wisatawan, dari mana mereka datang, usia, hobi, status sosial, dan lain-lain. Syamsuridjal (1997); Sinaga (2010);

Nasri (2023) berpendapat bahwa suatu obyek wisata dapat dikembangkan apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Atraction* atau Atraksi Wisata, yaitu segala sesuatu yang membuat tempat wisata unik dan menarik wisatawan untuk berkunjung.
2. *Accessibility* atau Aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk sampai ke tempat wisata.
3. *Amenity* atau Fasilitas Pendukung, yaitu fasilitas yang tersedia di sekitar objek wisata seperti penginapan dan restoran.
4. Lembaga atau Organisasi, yaitu lembaga atau organisasi yang menangani destinasi wisata ini

Menurut Yoeti (2006), ada empat prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

1. Keberlangsungan ekologi, yang berarti bahwa setiap upaya pengembangan pariwisata harus mampu menjaga dan merawat lingkungan wisata itu sendiri.
2. Keberlangsungan kehidupan dan budaya, di mana pengembangan pariwisata seharusnya dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya mereka sehari-hari.
3. Keberlangsungan ekonomi, yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata harus mendukung kegiatan ekonomi lokal agar tetap berjalan dengan baik.

4. Prinsip memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di daerah mereka.

Aspek pengembangan pariwisata menurut Santoso dalam Kurniawan (2015) adalah sebagai berikut:

1. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang menarik perhatian, baik dari keindahan alam seperti pemandangan yang menakjubkan, flora dan fauna yang unik, maupun karakteristik khas dari perairan seperti laut dan danau. Selain itu, atraksi ini juga mencakup objek buatan manusia seperti museum dan bangunan bersejarah, serta elemen budaya seperti seni, tradisi, dan kuliner lokal.
2. Transportasi memainkan peran penting dalam mengatur arus kedatangan wisatawan dan juga berkontribusi pada perkembangan tempat menginap yang tersedia.
3. Akomodasi adalah fasilitas yang menyediakan layanan penginapan, lengkap dengan makanan, minuman, dan berbagai layanan tambahan lainnya untuk kenyamanan para tamu.
4. Fasilitas Pelayanan mencakup berbagai sarana dan layanan yang disediakan, yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan.
5. Infrastruktur adalah fondasi yang mendukung semua layanan dan fasilitas tersebut. Pembangunan infrastruktur tidak hanya membantu dalam

meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

1.5.10 Sustainable Tourism

Pariwisata yang memperhatikan dampak sosial, budaya, dan ekonomi terhadap lingkungan baik bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dikenal sebagai pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) (Revida & Frida, 2023). Pertumbuhan pesat sektor pariwisata berkelanjutan, yang ditandai dengan peningkatan kapasitas akomodasi, populasi lokal, dan perubahan lingkungan, menuntut investasi yang bijaksana. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata tidak merusak lingkungan, tetapi justru memberikan manfaat positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal (I Nyoman Sukma Arida dalam Widiati (2022).

Swarbrooke dalam Pratiwi (2023) berpendapat bahwa pariwisata berkelanjutan melibatkan pengembangan yang seimbang dengan kebutuhan, tetapi tetap mempertahankan konservasi dan memberikan peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan dan mengembangkan pariwisata berdasarkan struktur sosial yang ada. Dalam proses ini, pariwisata berkelanjutan harus terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara terencana dan terstruktur.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, terdapat 4 (empat) pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Pilar ini juga menjadi kriteria yang telah dirumuskan oleh Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia (*Global Sustainable Tourism Council*), yang mencakup:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (*Sustainability Management*)
2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (*Social-Economy*)
3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (*Culture*)
4. Pelestarian lingkungan (*Environment*)

Secara spesifik Grundy dalam (Sutiarso, 2018) menyebutkan bahwa konsep *Sustainable Development* terdiri dari 3 (tiga) elemen system yang menyangkut:

1. Kelanjutan ekologis /lingkungan
2. Kelanjutan sosial
3. Kelanjutan ekonomi

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah “sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup” (Sukma, 2014).

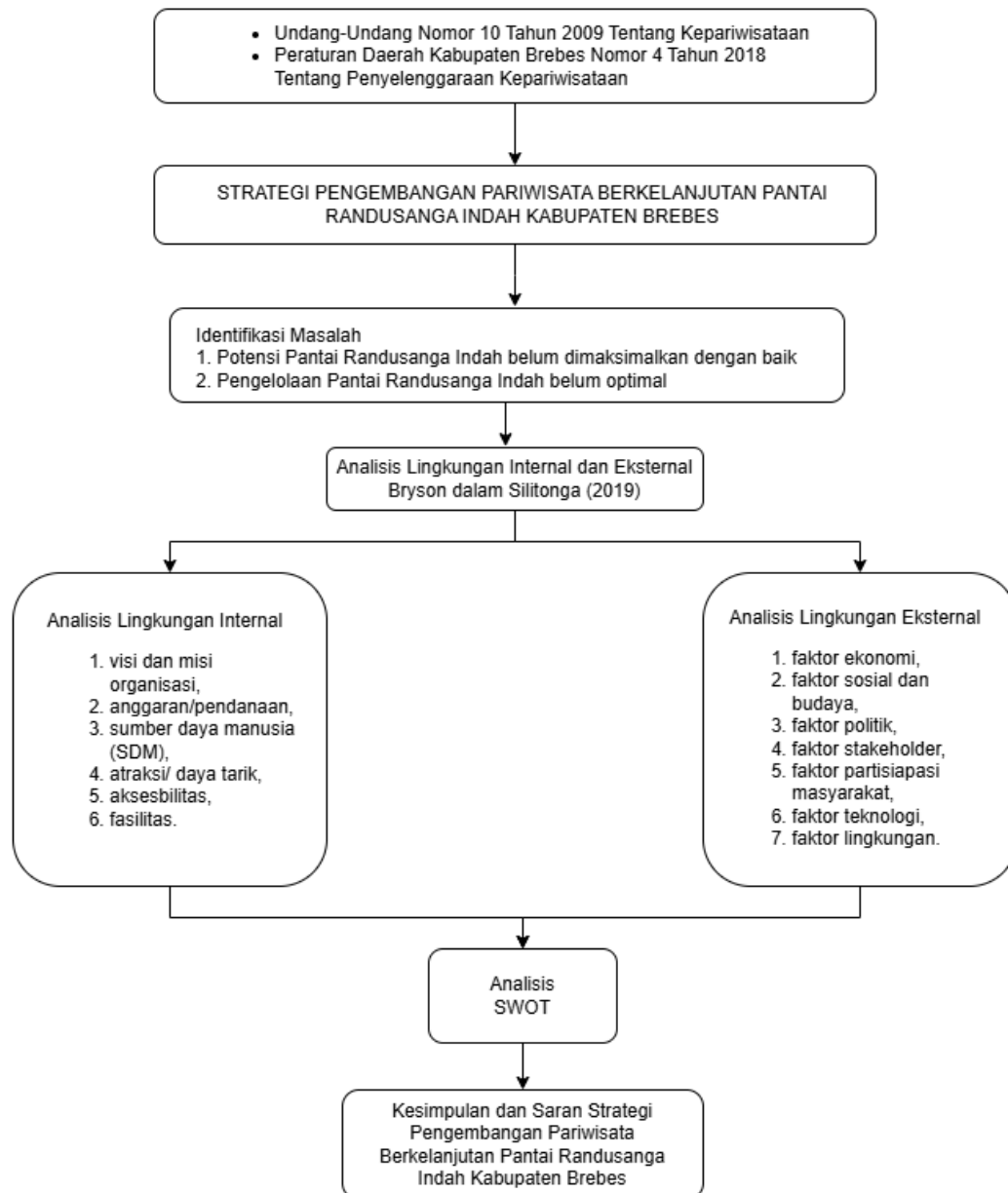
World Tourism Organization (WTO) telah mengembangkan indikator untuk pembangunan atau pengembangan pariwisata berkelanjutan, sebagai bukti komitmennya untuk mendukung agenda 21 sebagai keberlanjutan dari penciptaannya. Indikator-indikator ini termasuk:

- 1) Kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah.
- 2) Terlindungnya aset-aset budaya.

- 3) Partisipasi masyarakat.
- 4) Jaminan kesehatan dan keselamatan.
- 5) Manfaat ekonomi.
- 6) Perlindungan terhadap aset alami.
- 7) Pengelolaan sumber daya alam yang langka.
- 8) Pembatasan dampak.
- 9) Perencanaan dan pengembangan pembangunan.

1.5.11 Kerangka Pikir

Gambar 1.5 Kerangka Pikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.7 Operasional Konsep

Fenomena	Definisi	Sub Fenomena	Operasional
Lingkungan Internal	Fenomena "Lingkungan Internal" mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam pengelolaan wisata, seperti visi-misi, SDM, anggaran, fasilitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata.	Visi Misi	1. Keberadaan visi dan misi strategis.
			2. Keselarasan dengan tujuan pengembangan wisata.
			3. Implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan.
		Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Jumlah dan kualitas SDM.
			2. Hambatan dalam pengelolaan.
			3. Upaya peningkatan keterampilan.
		Anggaran	1. Keberadaan dan kecukupan anggaran.
			2. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
			3. Tindakan korektif terhadap penyimpangan.

		Amenitas	1. Jenis fasilitas tersedia.
			2. Kondisi fasilitas.
			3. Respon wisatawan terhadap fasilitas.
		Aksesibilitas	1. Kualitas akses jalan dan transportasi.
			2. Fasilitas transportasi lokal.
			3. Perbaikan atau peningkatan aksesibilitas.
		Atraksi	1. Jenis atraksi yang tersedia.
			2. Potensi atraksi lokal.
			3. Tantangan dalam penyelenggaraan atraksi.
Lingkungan Eksternal	Fenomena "Lingkungan Eksternal" mencakup faktor-faktor dari luar yang berkontribusi pengembangan wisata, seperti ekonomi, politik,	Faktor Ekonomi	1. Kondisi ekonomi masyarakat sekitar.
			2. Peluang dan ancaman ekonomi dalam pengembangan wisata.

	sosial budaya, teknologi, partisipasi masyarakat, stakeholder, dan lingkungan.	Faktor Politik	1. Regulasi dan kebijakan terkait.
			2. Pengaruh politik terhadap pengembangan wisata.
		Faktor Sosial Budaya	1. Kondisi sosial budaya masyarakat sekitar.
			2. Pemanfaatan sosial budaya untuk mendukung wisata.
		Faktor Teknologi	1. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital.
			2. Bentuk inovasi teknologi dalam wisata.
		Faktor Partisipasi Masyarakat	1. Peran aktif masyarakat dalam wisata.
			2. Efektivitas partisipasi masyarakat.
		Faktor Stakeholder	1. Identifikasi stakeholder yang terlibat.
		Faktor Lingkungan	1. Upaya menjaga kelestarian lingkungan.
			2. Pengelolaan limbah wisatawan dan komersial.

			3. Ancaman lingkungan terhadap pengembangan wisata
--	--	--	--

1.7 Argumen Penelitian

Pantai Randusanga Indah di Kabupaten Brebes memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Keindahan alam pantai, potensi ekonomi dari UMKM sekitar, serta lokasinya yang strategis di jalur Pantura menjadi peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, pengelolaan wisata ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas pendukung, aksesibilitas yang terbatas, minimnya promosi digital, serta partisipasi masyarakat yang belum terorganisir dengan baik. Selain itu, atraksi wisata yang tersedia masih terbatas pada wisata alam tanpa adanya event atau kegiatan yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Masalah kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi perhatian, mengingat masih banyak sampah berserakan akibat kurangnya tempat sampah dan sistem pengelolaan limbah yang memadai.

Untuk mengatasi masalah yang ditemukan, penelitian ini menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan sektor pariwisata Pantai Randusanga Indah serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan Pantai Randusanga Indah agar tidak hanya

meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara mendalam karakteristik, konteks, dan fenomena yang terkait dengan subjek penelitian. Denzin dan Lincoln dalam (Mamik, 2015) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

1.8.2 Situs Penelitian

Daerah penelitian adalah tempat dikumpulkan data dan melakukan observasi. Ini bisa mencakup wilayah geografis, institusi, atau lingkungan khusus di mana penelitian tersebut berlangsung. Lokasi penelitian berada di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Situs penelitian adalah tempat konkret di mana penelitian dilakukan. Ini bisa mencakup berbagai jenis lokasi, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Situs penelitian yang akan dilakukan berada di Pantai Randusangan Indah, Kabupaten Brebes.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus dari suatu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes), koordinator pengelola Pantai Randusanga Indah, masyarakat/pelaku usaha, dan pengunjung Pantai Randusanga Indah. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni, pemilihan beberapa subjek berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian agar memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan.

1.8.4 Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2010), terdapat dua jenis data yang dapat dibedakan, yakni kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan jenis data kualitatif. Pemilihan data kualitatif dalam penelitian dilakukan karena data tersebut mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap konteks, persepsi, dan kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

Data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman subjek penelitian. Selain itu, data kualitatif juga cocok digunakan ketika penelitian bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antarvariabel dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap fenomena alamiah yang kompleks.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek atau tempat di mana data diperoleh atau diambil (Jusuf, 2012). Berdasarkan asal perolehannya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Data primer digunakan dalam penelitian karena data primer memiliki ketepatan dan keakuratan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara pribadi, dokumentasi dan sebagainya sehingga cenderung lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu peneliti memiliki kontrol penuh terhadap proses pengumpulan data sehingga bisa memastikan data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap informasi dari data primer yang sudah diperoleh, serta untuk efisiensi waktu dan biaya karena pengumpulan data sekunder bisa berlangsung lebih cepat dan mudah sebab data sekunder sudah ada dan bisa mengumpulkan secara tidak langsung. Hal ini karena data sekunder telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sebelumnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari perspektif metode atau teknik pengumpulan data, dapat diidentifikasi bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi. (Sugiyono, 2010).

Ketiga teknik tersebut dipilih karena teknik observasi Observasi cocok digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan interaksi sosial, karena memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung tanpa memengaruhi situasi yang diamati. Selain itu, teknik wawancara memungkinkan pengembangan hubungan langsung antara peneliti dan narasumber informasi, menciptakan dasar bagi pengumpulan data yang akurat dan dapat diandalkan sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian mereka. Penggunaan teknologi untuk pengumpulan data juga perlu untuk mendukung wawancara dan observasi. Penggunaan teknologi tersebut seperti video recorder, kamera, atau perangkat audio, dapat membantu dalam mengumpulkan data dengan lebih efisien dan akurat.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data, menurut Sugiyono (2015), adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan informasi, menguraikannya ke dalam aspek-aspek yang berbeda, menyusun informasi dengan cara tertentu, memilih komponen-komponen yang relevan untuk diperiksa, dan menarik kesimpulan yang membuat informasi tersebut lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain. Penelitian ini menggunakan proses analisis data kualitatif dan kuantitatif multi-tahap, yang meliputi langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Tindakan memilih, berkonsentrasi, meringkas, dan memodifikasi data yang belum diproses dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Karena

data lapangan cenderung bertambah banyak, dokumentasi yang cermat dan menyeluruh sangat penting. Jumlah, kompleksitas, dan kekompleksan data yang dikumpulkan meningkat seiring dengan lamanya penelitian. Akibatnya, analisis reduksi data harus segera diselesaikan. Peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan mengurangi data, yang akan memudahkan pengumpulan data di kemudian hari dan mengambilnya kembali saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses di mana informasi yang direduksi menjadi lebih terstruktur untuk pemahaman yang lebih baik. Penataan data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk memahami pola atau tren yang terjadi, apakah kesimpulan yang ditarik sesuai atau diperlukan analisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan

Sementara reduksi data bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari data yang dikumpulkan di lapangan, kesimpulan dibuat untuk mendapatkan hasil ini. Kesimpulan ini keluar secara spesifik berdasarkan reduksi data. Pada titik ini, penyajian data menanggapi masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyatakan atau mengajukan temuan penelitian yang akurat.

Analisis SWOT digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan yang dimiliki organisasi. Hasil dari analisis SWOT dapat memberikan wawasan mengenai isu-isu

strategis yang perlu diperhatikan. Untuk menilai sejauh mana isu-isu tersebut bersifat strategis, digunakan pertanyaan Litmus Test. Menurut Bryson (2016:184), Litmus Test mengukur sejauh mana suatu masalah dapat dikategorikan sebagai strategis. Uji ini digunakan untuk menyaring isu-isu strategis sehingga hanya isu-isu yang benar-benar strategis yang teridentifikasi, yaitu yang memiliki skor tinggi di semua dimensi, sementara isu-isu operasional adalah yang memiliki skor rendah di semua dimensi. Setelah mengidentifikasi isu tersebut, total skor dijumlahkan untuk menghasilkan penilaian sebagai berikut: jika total skor berada di antara 13-21, maka isu tersebut termasuk dalam kategori kurang strategis; jika total skor berada di antara 22-30, maka isu tersebut termasuk dalam kategori cukup strategis; dan jika total skor 31 atau lebih, maka isu tersebut termasuk dalam kategori sangat strategis. Berikut adalah daftar pertanyaan yang terdapat dalam Uji Litmus.

Tabel 1.8 Daftar Pertanyaan Uji Litmus

No	Pertanyaan	Skor		
		Operasional – Strategis		
		1	2	3
1.	Kapan organisasi dihadapkan pada tantangan atau kesempatan yang muncul dari isu-isu strategis?	Sekarang	Tahun Depan	Dua tahun atau lebih dari sekarang
2.	Seberapa luas isu berpengaruh pada organisasi?	Unit/bagian tunggal	Beberapa bidang	Seluruh organisasi
3.	Seberapa besar peluang atau risiko keuangan yang dihadapi oleh organisasi?	Kecil (<10% dari anggaran)	Sedang (10-25% dari anggaran)	Besar (>25% dari anggaran)
4.	Apakah pemecahan isu melalui strategi akan membutuhkan:	Tidak		Ya

	a. Pengembangan program pelayanan dan sasaran baru?			
	b. Apakah akan ada perubahan yang signifikan dalam jumlah atau sumber pajak?	Tidak		Ya
	c. Apakah akan terjadi perubahan yang signifikan dalam ketentuan peraturan atau undang-undang?	Tidak		Ya
	d. Apakah akan ada penambahan atau perubahan pada fasilitas?	Tidak		Ya
	Apakah akan ada penambahan jumlah karyawan yang cukup besar?	Tidak		Ya
5.	Pendekatan terbaik bagi pemecahan isu?	Jelas, siap diimplementasikan	Parameter luas, agak diperinci	Terbuka luas
6.	Tingkat keputusan untuk menyelesaikan isu?	Pengawas Staf Lini		Kepala Bagian
7.	Konsekuensi yang bisa terjadi jika isu tidak diselesaikan?	Ada gangguan, tidak efisiensi	Kekacauan pelayanan, kehilangan sumber dana	Kekacauan pelayanan jangka panjang dan biaya besar/merosot-nya penghasilan
8.	berapa banyak organisasi/instansi yang terlibat dalam penyelesaian isu tersebut?	Tidak ada	Satu sampai tiga	Empat atau lebih
9.	Bagaimana sensitivitas isu ini terkait dengan nilai masyarakat, sosial, politik, kultural?	Lunak	Sedang	Keras

Sumber: Bryson, 2016.

1.8.8 Kualitas Data

Teknik kualitas data dengan metode triangulasi adalah metode pengumpulan data yang sifatnya menyatukan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode atau sumber data dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman fenomena yang komprehensif. Terdapat empat jenis triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai teknik kualitas data dengan metode triangulasi:

1. Triangulasi metode: caranya mengkomparasi informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dengan menggunakan beberapa metode tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Triangulasi antar-peneliti: Dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam pengumpulan data, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan tentang subjek yang diteliti. Namun, perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.
3. Triangulasi sumber data: upaya peneliti untuk mencari kebenaran informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai tempat dan

menggunakan bermacam metode. Misalnya, peneliti tidak hanya melakukan wawancara, tetapi juga mempelajari dokumen tertulis atau pengumpulan gambar.

4. Triangulasi teori: dengan membandingkan hasil penelitian dengan berbagai teori yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mencegah bias dan meningkatkan keyakinan terhadap temuan penelitian. Dengan kata lain, peneliti memastikan bahwa hasil penelitian cocok dengan teori yang ada.

Penelitian ini menggunakan kualitas data triangulasi sumber data yaitu dengan melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk mengonfirmasi atau melengkapi informasi yang diperoleh dari masing-masing sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan sebelumnya.